

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan. Hal ini dikarenakan TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat. Contohnya dalam bidang pemerintahan, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi disediakan selama 24 jam dalam sehari tanpa harus menunggu dan tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Dampak positif dari penggunaan IT juga terlihat pada peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik.

Semua institusi/organisasi saat ini tidak ada yang luput dari perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi oleh semua organisasi baik swasta maupun sektor publik dikarenakan kompetisi semakin ketat dan tuntutan masyarakat/konsumen makin tinggi. Untuk organisasi swasta mereka butuh menggunakan teknologi ketika pesaing mereka juga menggunakan teknologi dalam mendukung aktivitas operasionalnya. Pada saat teknologi memberikan banyak dukungan bantuan pada pesaingnya, maka perusahaan juga harus ikut mengadopsi teknologi agar tidak tertinggal dari pesaing. Sementara untuk organisasi sektor publik mereka harus juga menyesuaikan diri dikarenakan tuntutan kehidupan di masyarakat yang berubah menyebabkan pemerintah harus memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat.

Tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik

dalam melakukan perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Informasi dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi. Setiap instansi dituntut untuk bisa memberikan suatu informasi yang tersaji secara terstruktur dengan baik, akurat dan terpercaya untuk digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lau (2004) informasi yang memadai hanya dapat dihasilkan oleh sistem informasi yang mampu menangkap, menciptakan dan memanipulasi informasi internal dan eksternal secara efektif. Dengan memanfaatkan sistem informasi organisasi sektor publik dapat menghasilkan informasi yang fleksibel, efektif dan efisien sehingga organisasi sektor publik tersebut dapat meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif dan mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan dengan tata kelola yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mendukung terlaksananya *good governance*, guna mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang berkesinambungan, profesional, transparan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disempurnakan lagi oleh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut maka sejak tanggal 19 Juli 2004, diterapkan juga UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 15 Tahun 2004 tersebut memberikan kejelasan posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai organisasi yang bebas dan mandiri.

Sayangnya, meskipun BPK sudah melakukan tugasnya akan tetapi masih banyak terjadi persoalan terkait aset pemerintah. Persoalan aset pemerintah menjadi berita di media massa, mulai dari pemberitaan adanya sekian hektar lahan dikuasai warga secara ilegal, fisik aset tidak ditemukan walau terdapat pencatatan atau sebaliknya, penggunaan aset belum sesuai

ketentuan sampai dengan rencana pembelian aset oleh pemerintah daerah (pemda) tertentu yang belakangan diketahui sebagai aset milik pemerintah pusat (Bisnis Indonesia, 2016a, 2016b). Pemberitaan ini didukung oleh sebuah studi untuk World Bank yang dilakukan oleh Kaganova dan Nayar-Stone (2000) menerangkan bahwa pemda di hampir semua negara memiliki aset publik dalam jumlah yang signifikan serta belum banyak kesadaran dimiliki oleh pemda di negara berkembang bahwa aset publik merupakan portofolio yang seharusnya dikelola dengan baik karena memberi manfaat langsung yaitu efisien atas anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan atas manfaat aset. Menambahkan studi/riset yang pernah dilakukan, maka perlu disandingkan dengan fakta yang dipaparkan oleh BPK terhadap manajemen aset dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, dimana ada beberapa persoalan yang sering muncul yaitu (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum optimal (*underutilized*); (5) Standard Operating Procedure (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset tidak diketahui keberadaannya; (9) mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan temuan BPK RI, permasalahan aset menjadi permasalahan yang signifikan pada tahun 2009 sampai 2011 yang menyebabkan BPK mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (lukito dalam [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Informasi mengenai aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tertuang dalam neraca. Neraca dalam LKPP merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan Kementerian /Lembaga (LKKL). Dalam neraca tersebut, informasi barang milik negara yang tertuang dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) yang memberikan sumbangan yang signifikan. LBP sendiri merupakan gabungan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP). Informasi yang berasal dari LBKP tersebut berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban atas BMN menjadi sangat penting. Keakuratan data BMN tentunya sangat dibutuhkan dalam

mendukung laporan keuangan agar tersaji secara wajar.

Rynandi (2008) mengemukakan bahwa penerapan dan pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara dapat berjalan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang menanganinya mengerti dan memahami tentang sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yasser (2010) menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset belum berjalan optimal sehingga mempengaruhi keakuratan data BMN yang tersaji. Aktivitas penatausahaan sampai dengan tersusunnya laporan BMN oleh pemerintah tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, bahkan penyusunan laporan BMN, sebagian besar menggunakan bantuan komputer

Pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan telah membuat aplikasi komputer untuk mempermudah penyusunan laporan BMN. Aplikasi ini muncul pertama kali tahun 2004 dengan nama SAAT (Sistem Akuntansi Aset Tetap). Setelah beberapa kali mengalami perbaikan dan perubahan, aplikasi penyusunan laporan BMN saat ini bernama aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). Dalam peraturan pemerintah PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan Sistem informasi manajemen dan akuntansi adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi aset/kekayaan negara di setiap satuan kerja di K/L pusat maupun instansi yang di daerah. Menurut Muldiyanto (2015) SIMAK BMN merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), yang disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau pemegang barang yang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian/seksi perlengkapan/rumah tangga atau yang semacamnya. Aplikasi SIMAK BMN dikembangkan menggunakan Microsoft Visual Foxpro dengan Database MySQL. Konsep aplikasinya terdiri dari 4 (empat) level sesuai levelisasi organisasi yaitu:

1. UAKPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat satuan kerja yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan barang.

2. UAPPB-W merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kantor wilayah yang ditetapkan sebagai koordinator.
3. UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat eselon I, penanggung jawabnya pejabat E1
4. UAPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kementerian negara/lembaga (pengguna barang), Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai penanggung jawab.

Tiap level memiliki dua menu utama yaitu menu administrasi dan menu operator dan proses perekaman transaksi BMN hanya ada di level UAKPB. SIMAK BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang. SIMAK BMN memberikan sumbangan yang cukup signifikan didalam laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan (neraca), yaitu berkaitan dengan rekening persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. SIMAK BMN juga berfungsi sebagai sistem penatausahaan BMN dalam hal rencana pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan.

Salah satu K/L yang menggunakan aplikasi diatas yaitu Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLH). Instansi ini memiliki 10 direktorat jenderal dan 2 badan setingkat eselon 1 (E1). Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) merupakan salah satunya yang memiliki satuan kerja terbanyak yaitu 83 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Secanggih apapun aplikasi yang digunakan bila tidak didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta faktor pendukung lain seperti sumber daya manusia, spesifikasi barang, dan budaya organisasi, maka dalam penggunaan aplikasi tersebut tidak dapat optimal. Hampir setiap kali rekonsiliasi ada saja masalah yang muncul pada aplikasi simak BMN atau Saiba. Kedua aplikasi yang saling terkait, dan permasalahan biasanya berawal dari aplikasi SIMAK karena aplikasi Saiba pada dasarnya hanya menerima arsip data komputer (ADK) dari aplikasi SIMAK. Salah satu permasalahan ini menyebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan

keuangan yang nantinya akan mengganggu kinerja instansi secara keseluruhan.

Menurut Edison *et al*, (2012) Sistem informasi memberikan kesempatan bagi pebisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Bobnar dan Hopwood (2003) menambahkan bahwa suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penggunaan teknis belaka, namun faktor perilaku dan individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi suatu sistem yang terdiri dari pelatihan, dukungan manajemen puncak, dan kejelasan tujuan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jen (2002) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa diantaranya (1) Keterlibatan Pemakai dalam pengembangan sistem, (2) Kemampuan teknik personal sistem informasi, (3) Ukuran Organisasi, (4) Dukungan top Management, (5) Formalisasi pengembangan sistem informasi, (6) Program pelatihan dan pendidikan pemakai, (7) Keberadaan dewan pengarah sistem informasi, (8) Lokasi departemen sistem informasi.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Bobnar dan Hopwood (2003) bahwa suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penggunaan teknis belaka, namun faktor perilaku dan individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi suatu sistem yang terdiri dari pelatihan, dukungan manajemen puncak, dan kejelasan tujuan. Pendapat ini didukung oleh Veithzal (2009) yang menjelaskan arti penting dari pelatihan bahwa pelatihan adalah suatu proses yang sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya pelatihan operator dapat menggunakan kemampuannya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu sistem. Dengan tidak adanya pelatihan, maka akan berdampak pada hilangnya kekuasaan operator, jika tenaga kerja dikurangi dengan tidak adanya kemampuan operator dalam penggunaan sistem dan komputerisasi, dan ini berakibat sistem tidak bisa dilaksanakan dan tujuan tidak bisa tercapai, sehingga tidak tercapai

keberhasilan sistem informasi.

Selain pelatihan, dukungan manajemen puncak juga mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Menurut Nasution (1992) dalam (latifah, 2007) menjelaskan bahwa dukungan manajemen puncak dapat diartikan keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Salah satu bentuk dukungan manajemen adalah menyediakan fasilitas. Fasilitas yaitu dapat berupa pelatihan dan memberikan bantuan kepada pemakaisistem ketika menghadapi permasalahan yang terkait dengan sistem (Jogiyanto, 2007). Dengan adanya fasilitasakan meningkatkan kemampuan dan memudahkan operator menghasilkan informasi yang berkualitas. Dukungan dalam suatu inovasi sangat penting juga karena adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya, tujuan dan inisiatif strategi. Dukungan yang penuh dari manajer dapat mewujudkan efektivitas suatu sistem.

Suatu sistem berjalan secara efektif apabila mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan informasi yang berkualitas kepada pengguna baik internal maupun eksternal. Agar efektivitas penggunaan sistem informasi dapat terwujud maka dukungan manajemen dan diklat haruslah dipertimbangkan. Hal ini penting diteliti untuk mengingatkan jika suatu organisasi terdapat kekurangan pelatihan dan tidak adanya dukungan manajemen puncak akan mengakibatkan sistem informasi tidak efektif.

Hasil penelitian Yulianto (2016) menunjukkan bahwa kemampuan pengguna, kualitas sistem informasi dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengguna SIA sedangkan keterlibatan pengguna dan dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengguna SIA. Hal ini sejalan dengan penelitian Putriani (2011) mengungkapkan bahwa keterlibatan pemakai, dukungan manajemen pengembang sistem, program pendidikan dan pelatihan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja SIA, akan tetapi kemampuan teknis memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja SIA.

Namun terdapat hasil yang berbeda dalam penelitian Aryani (2013) bahwa dukungan top manajemen, kemampuan pengguna dan adanya

pendidikan dan pelatihan pengguna SIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SIA. Hasil ini juga didukung oleh Yulianti (2013) menerangkan bahwa pelatihan dan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif dan signifikan dalam penerapan SIA.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2015) yang menguji pengaruh pelatihan dan dukungan manajemen puncak terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi, namun peneliti menambahkan faktor pendidikan serta mengukur efisiensi dalam penggunaan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN). Alasan peneliti milih operator aplikasi SIMAK BMN menjadi objek penelitian adalah karena kompleksitas data yang harus diinput dan data Simak BMN menjadi data yang utama dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak dan Diklat Pengguna Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Studi Kasus Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap efektivitas penggunaan aplikasi SIMAK BMN?
2. Apakah terdapat pengaruh Diklat pengguna sistem terhadap efektivitas penggunaan aplikasi SIMAK BMN?
3. Apakah terdapat pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap efisiensi penggunaan aplikasi SIMAK BMN?
4. Apakah terdapat pengaruh diklat pengguna sistem terhadap efisiensi penggunaan aplikasi SIMAK BMN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap



efektivitas penggunaan aplikasi SIMAK BMN

2. Untuk mengetahui pengaruh Diklat terhadap efektivitas penggunaan aplikasi SIMAK BMN
3. Untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap efisiensi penggunaan aplikasi SIMAK BMN
4. Untuk mengetahui pengaruh Diklat terhadap efisiensi penggunaan aplikasi SIMAK BMN

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik yang sama dapat mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan dan referensi.
  - b. Dapat memperluas wawasan dan daftar pustaka bagi pembacanya
  - c. Dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai Sistem Informasi Akuntansi
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi  
Hasil diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan untuk pengambilan keputusan.
  - b. Bagi Peneliti  
Menjadi sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama di bangku perkuliahan serta dapat memberi gambaran terkait berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sistem informasi.

